

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

33. Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) Provinsi

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025										Kinerja	Indikator	Satuan
					6												
1	2	3	4	5	6										7	8	9
1	Rehabilitasi di luar Kawasan sesuai kewenangannya	a. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL), Rencana Pembangunan Hutan Kota	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun	Dokumen				
		b. Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan RHL yang menjadi kewenangannya	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen				
		c. Pelaksanaan RHL sesuai Rancangan Teknis untuk kegiatan:															
		1). Pembangunan Hutan Hak/Hutan Rakyat	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat d Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				
					3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				
		2). Penghijauan lingkungan;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				
		3). Pembangunan Hutan kota;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				
		4). Penanaman mangrove, gambut dan hutan pantai diluar Kawasan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha				
					2	11	03	1.03	0007	Pelaksanaan rehabilitasi	Pelaksanaan rehabilitasi Lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Provinsi	Ha				
					3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha				
					3	28	03	1.04	0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha				
					3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha				
					3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan	Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit				
					3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit				
					3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit				
d.	Pemeliharaan tanaman	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan					
e.	Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan					
			3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman RHL pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	Ha						
f.	Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi lahan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan					
g.	Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 dan PP-26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha					
2	Rehabilitasi hutan dan lahan sesuai kewenangannya	a. Rehabilitasi Hutan dan lahan yang menjadi kewenangannya															
		1). Penanaman rehabilitasi DAS apabila Pemerintah Daerah bertindak sebagai pemegang Persetujuan Kawasan Hutan (P2KH)	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen				
		2). Budidaya/pembangunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada KPH (Berdasarkan UU.23 tentang Pemerintah Daerah);	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.06	0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan akses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan menengah	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	Unit Manajemen				

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kemdagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
1	2	3	4	5	6						7	8	9
		3). Pemeliharaan tanaman;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
		4). Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
		5). Kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PP Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman RHL pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	Ha
	b.	Rehabilitasi hutan dan lahan oleh masyarakat meliputi penanaman oleh pemegang izin Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai rencana kegiatan Perhutanan Sosial	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
	c.	Rehabilitasi hutan dan lahan di taman Hutan raya yang terdiri atas:											
		1). Penghijauan;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
		2). Reboisasi;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
		3). Pemeliharaan tanaman;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
					3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman RHL pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	Ha
		4). Pengayaan tanaman;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit berkualitas	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Batang
					3	28	04	1.01	0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Ha
					3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan	untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit
		5). Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit
					3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit
					3	28	03	1.04	0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha
		6). Penanaman pohon kanan kiri sungai; dan	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
		7). Pengendalian kebakaran Hutan dan lahan.	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
		8). Pemeliharaan lanjutan (Pasca Pemeliharaan kedua/P2)	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman RHL pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	Ha
		9). Kegiatan pendukung rehabilitasi Hutan dan lahan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PP Nomor 26 Tahun 2020	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
	d.	Rehabilitasi hutan dan reklamasi di areal Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dalam hal Pengelola KHDTK melakukan kerja sama pengelolaan KHDTK dengan Pemerintah Daerah Provinsi	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	3.11	0001	Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Terlaksananya pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Jumlah KHDTK untuk kepentingan non-komersial	Unit
					3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
	e.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai											
		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, melalui :											
		1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
					6								
1	2	3	4	5							7	8	9
		2) Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen
		3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang
		4) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Lembaga	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga
		5) Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada DAS kritis dan sangat kritis	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
3	Pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan	a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Tahura)											
		1. Penyusunan Desain Tapak Kawasan Tahura	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0016	Penataan kawasan Tahura Provinsi	Pelaksanaan Penataan Blok TAHURA Provinsi	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi	Dokumen
		2. Pembangunan Sarpras Dasar Pengelolaan Wisata Alam (Gerbang, Loket, Papan Informasi, Toilet)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Permohonan
		3. Penetapan Areal Pemanfaatan Air (PAPA) di Tahura Kawasan Konservasi	Unit KK	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Dokumen
		4. Operasional Sarana dan Prasarana Taman Hutan Raya Provinsi	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi			
		b. Pengelolaan persampahan	Ton	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	11	1.01	0011	Pengelolaan sampah Regional	Terlaksananya pengelolaan sampah regional	Jumlah Sampah regional yang dikelola	Ton
		c. Sosialisasi kepada pengunjung wisata dan masyarakat sekitar Tahura	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa
		d. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Dokumen/ Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pemantauan/Monitoring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Terbit pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Unit Managemen
		e. Pembinaan dan pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Dokumen/ Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0016	Penataan kawasan Tahura Provinsi	Pelaksanaan Penataan Blok TAHURA Provinsi	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi	Dokumen
					3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan
		f. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHH) melalui sistem pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu skala dan menengah kecil yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Unit Managemen
					3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan
		n	Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan, Hasil	Jumlah Pemanfaatan	1. Pemerintah	3	28	03	1.06	0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
1	2	3	4	5	6						7	8	9
		g. Hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan		2. Masyarakat	3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan
		h. Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.06	0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan akses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan menengah	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	Unit Manajemen
		i. Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.06	0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan akses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan menengah	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	Unit Manajemen
		j. Pengawasan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan (PBPHH)	Dokumen/ Rekomendasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
					3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pemantauan/Monitoring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Terbitalaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Unit Manajemen
		k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
					3	28	03	1.06	0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terpenuhinya hak akses SI- RPBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah	Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBPHH	Unit Manajemen
					3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakan/lanjutan berupa penerapan Sanksi Administratif	Unit Manajemen
		l. Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pemantauan/Monitoring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Terbitalaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Unit Manajemen
		m. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan
		n. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu skala dan menengah kecil yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Unit Manajemen
					3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakan/lanjutan berupa penerapan Sanksi Administratif	Unit Manajemen
		o. Pengelolaan Keekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik											
		1) Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan tidak termasuk Appendix CITES melalui pengawasan, patroli dan sosialisasi	Entitas	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan
		2) Pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga KSA/KPA melalui invent potensi kehati spesies dan genetik	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha
		3) Penyusunan Profil Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
		4) Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati, Spesies dan Genetik Daerah Provinsi	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
1	2	3	4	5	6						7	8	9
		5) Pengembangan sistem data base kehati daerah provinsi (Balai Kliring)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	1.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit
		6) Penyusunan dan Pengembangan Desain Dasar Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati	Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
		7) Pembinaan dan edukasi kepada Kabupaten/kota terkait pencadangan sumber daya alam hayati dan Kawasan/Area dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan hutan dan kawasan Konservasi	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Meningkatnya jumlah orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Orang
		8) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial :											
		a) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha
					3	28	03	1.05	0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (legal logging dan TSL)	Operasi
		b) Penyediaan Sarpras Pengelolaan	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		c) Pendidikan/penelitian dan Penyadartahuan	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang
		d) Inventarisasi/Monitoring Potensi Kehati	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
		e) Pemulihan Ekosistem/ Pembinaan Habitat	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	a. Fasilitasi penyiapan akses legal PS dalam bentuk Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat											
		1) Operasional POKJA PPS	Jumlah Kegiatan	POKJA PPS Provinsi	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		2) Sosialisasi tingkat tapak	Jumlah lokasi	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		3) Pendampingan dan Fasilitasi Permohonan persetujuan pengelolaan PS	Jumlah Calon Lokasi PS	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		4) Pendampingan dan Fasilitasi Permohonan Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;	Jumlah Pemegang Persetujuan Pengelolaan PS	Kelompok Masyarakat sekitar Hutan	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		5) Pendataan potensi konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Lokasi Konflik	Masyarakat yang berkonflik	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		6). Fasilitasi Penanganan konflik tenurial dan hutan adat;	Jumlah Lokasi Konflik	Masyarakat yang berkonflik	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		7). Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah MHA, dan/atau	Jumlah Komunitas MHA	Komunitas MHA	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		8) Fasilitasi pengakuan dan perlindungan kearifan	Dokumen	Komunitas MHA dan	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
					6								
1	2	3	4	5	6						7	8	9
		lokal	Dokumen	Pengampu kearifan lokal	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		b. Fasilitasi peningkatan Kelas kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)											
		1) Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial	Jumlah Dokumen	KUPS	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		2) Pelatihan pengembangan usaha/kerjasama usaha	Jumlah KUPS	KUPS	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkatkan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya	Orang
		3) Pelatihan pengembangan kewirausahaan	Jumlah KUPS	KUPS	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkatkan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya	Orang
					3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
		4) Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial	Jumlah KUPS	KUPS	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkatkan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya	Orang
		5) Pembangunan agroforestry	Jumlah KUPS	KUPS	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		6) Pemberian bantuan alat ekonomi produktif	Paket	KUPS	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
		7) Pendampingan kelompok Perhutanan Sosial											
		a) Sarpras pendukung pelaksanaan pendampingan	Unit	1. Pemerintah 2. KUPS	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		b) Operasional Pendamping	Jumlah Pendamping	KUPS	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
					3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		c). Peningkatan kapasitas Pendamping PS	Jumlah Pendamping	KUPS	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya	Orang

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
					6								
1	2	3	4	5							7	8	9
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM Bidang Kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	Orang
					3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
		8) Pengawasan dan Pengendalian PS											
		a) Monitoring dan Evaluasi Kelompok PS	Kegiatan	1. Pemerintah 2. KUPS	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		b) Sarpras pendukung pelaksanaan Monev	Unit	1. Pemerintah 2. KUPS	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		c. Pemberian Akses Kelola Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat disekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam											
		1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Pemberdayaan Masyarakat disekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	Hektar	Masyarakat	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		2) Pembentukan/Penguatan Kelembagaan	Desa/Kelompok	Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		3) Perjanjian Kerja Sama	Perjanjian	Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		4) Pelatihan Masyarakat	Kelompok	Masyarakat	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang
		d. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar disekitar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam											
		1) Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Desa/Kelompok	Masyarakat	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		2) Pembentukan Kelembagaan	Kelompok	Masyarakat	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang
		3) Pelatihan Masyarakat	Kelompok	Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang
		4) Pemberian Bantuan Usaha	Unit	Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
		e. Dukungan fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial di kabupaten/kota dalam satu provinsi melalui :											
		1) Fasilitasi penguatan sinergitas dan kolaborasi multipihak dalam pengembangan IAD di wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terfasilitasinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
1	2	3	4	5	6						7	8	9
		2) Fasilitasi penyusunan dan pengesahan dokumen IAD	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam mneyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
		3) Dukungan verifikasi teknis dalam proses pemberian persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;	Dokumen / Berita Acara Verifikasi Teknis	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		4) Fasilitasi pengembangan usaha, meliputi :											
		a) Fasilitasi penyusunan rencana kelola PS/rencana kerja tahunan dan pembentukan KUPS	Jumlah KPS	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
		b) Fasilitasi terbentuknya kelompok sadar wisata	Jumlah Kelompok	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	26	02	1.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
		c) Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai koperasi	Jumlah KPS	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha
		d) Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai UMKM	Jumlah KPS	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha
		e) Fasilitasi pelatihan kelautan dan perikanan	KUPS Pembudidayaan ikan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok
		f) Fasilitasi penguatan kerja sama usaha KPS dengan BUMDes/BUMDesma	Jumlah BUMDEs/ BUMDesma	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
		g) Penyusunan panduan avokasi dan kerja sama desa untuk Perhutanan Sosial	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	13	04	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	Dokumen
					2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen
		h) Sosialisasi regulasi pemanfaatan dana desa untuk Perhutanan Sosial	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen
		i) Fasilitasi pendampingan untuk peningkatan usaha (KUR)	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	17	08	1.01	0003	Pengembangan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha
		j) Fasilitasi sertifikasi produk hasil hutan dari PS	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	17	07	1.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha
		k) Fasilitasi standarisasi produk hasil hutan dari PS	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	17	07	1.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha
		l). Fasilitasi perluasan akses pasar / promosi KUPS melalui LKPP, e-commerce, pameran, promosi, dll	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan
		m). Bimbingan teknis pengembangan ekowisata	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
1	2	3	4	5	6						7	8	9
		n) Bimbingan teknis pengembangan usaha pembudidayaan ikan	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan
		o) Fasilitasi pembangunan rumah kemasam	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
		p) Fasilitasi bantuan bibit tanaman	Batang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	27	02	1.02	0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang
					3	28	03	1.09	0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun	Kali
		q) Fasilitasi pengembangan desa wisata	Desa	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
		5) Penyediaan sarana dan prasarana											
		a) Fasilitasi bantuan sarana prasana produksi pertanian	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasnya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
					3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
					3	27	03	1.01	0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
		b) Fasilitasi bantuan sarana prasana produksi perikanan	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit
					3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit
		c) Fasilitasi pembangunan akses jalan ke lokasi PS	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
		d) Fasilitasi sarana prasarana wisata KUPS	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit
		e) Fasilitasi peningkatan sarana prasarana akses telekomunikasi KUPS	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
		6) Pendampingan											
					3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
					3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan	
1	2	3	4	5	6						7	8	9	
		a)Operasional pendamping	Orang	1. Pemerintah 2. Pendamping Masyarakat	2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	
					3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	
			b)Penyediaan sarana dan prasana pendamping	Unit	1. Pemerintah 2. Pendamping Masyarakat	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
			c)Fasilitasi pengembangan kompetensi pendamping	Orang	1. Pemerintah 2. Pendamping Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		3				28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	
			7)Pelatihan											
			a) Fasilitasi peningkatan kapasitas pendamping melalui pelatihan	Pendamping	1. Pemerintah 2. Pendamping Masyarakat	3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang
		3				25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	
		3				28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	
		3				28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	
			b) Penyelenggaraan sekolah lapang bagi pendamping	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Pendamping Masyarakat	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasiikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen
		3				27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	
			c) Fasilitasi penguatan kapasitas KPS dalam pemanfaatan teknologi tepat guna oleh Perguruan Tinggi	Jumlah KPS	1. Pemerintah 2. Pendamping Masyarakat	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
			8) penelitian dan pengembangan yang mendukung pengembangan IAD berbasis PS	Kegiatan	Pemerintah Masyarakat	5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen
5	05	02				1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen			
5	Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan	a. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan												
		1) Rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan perlindungan hutan:												
		a) Kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan produksi di wilayah KPH yang belum dibebani izin (diluar PIAPS, TORA, HPK, dan hutan alam gambut) secara partisipatif.	Lokasi	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi.	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha	
		b) Pengembangan kelembagaan tingkat tapak (KPH) dalam rangka pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan dan pembalakan liar pada kawasan hutan melalui penguatan Resort Based Management (RBM).	Lembaga	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi.	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan	

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
1	2	3	4	5	6						7	8	9
		2) Penguatan kelembagaan KPH dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Ketahanan Pangan dan multiusaha kehutanan (Agroforestry, Sylvopastura, Silvofishery);											
		a) Fasilitasi Kegiatan Bimtek, Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat di Wilayah KPH Untuk Mendukung Kegiatan Hutsos.	Kegiatan	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan	Unit
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang
		b) Fasilitasi Pendampingan Budidaya dan Produksi Masyarakat di Wilayah KPH.	Kegiatan	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan	Unit
		c) Fasilitasi Pendampingan Penanganan Pascapanenan dan Pemasaran Usaha Masyarakat di Wilayah KPH	Kegiatan	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan	Unit
		3) Pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian operasional KPH											
		a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM	Orang	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
					3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit
		b) Operasional KPH	Bulan	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi.	3	28	03	1.01	0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH	Dokumen
		4) Pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dalam bentuk Optimalisasi PNPB dalam bentuk pembinaan dan evaluasi atas PNPB (pengawasan, pengendalian dan rekonsiliasi) Perizinan Berusaha.	Kegiatan	Seluruh KPH di Pemerintah Provinsi.	3	28	03	1.06	0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPBH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terpenuhinya hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPBH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah	Jumlah Unit manajemen PBPBH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Unit Manajemen
					3	28	03	1.04	0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPH/LP	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPH/LP	Jumlah laporan nilai PNPB dari pemanfaatan hutan di KPH/LP	Laporan
		b. Pembangunan dan Pengelolaan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan:											
		Penguatan kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan:											
		1) Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan.	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
		2) Fasilitasi pembangunan hutan pola agroforestry (Sylvopastura maupun Silvofishery).	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan	Unit
		3) Fasilitasi pengembangan usaha jasa lingkungan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
					3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan	Unit
		4) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi masyarakat yang memiliki akses legal dalam pemanfaatan hutan (HHBK dan Jasa Lingkungan).	Lembaga	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan Sosial di KPH pada Pemerintah Provinsi.	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan	Unit
		5) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Perhutanan sosial.	Kegiatan	Masyarakat yang memiliki akses legal pemanfaatan hutan dan Perhutanan	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan	Unit
		c. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam bentuk fasilitasi kegiatan produktif dalam pengolahan hasil hutan:											
		1) Pembentukan kelembagaan Koperasi bagi Pengolahan hasil hutan skala kecil/UMKM.	Lembaga	UMKM/ Masyarakat yang memiliki PBPBH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
					6								
1	2	3	4	5	6						7	8	9
1		2) Fasilitasi pendampingan dalam rangka penjaminan legalitas hasil hutan bagi Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil/UMKM.	Kegiatan	UMKM/ Masyarakat yang memiliki PBPHH skala kecil di 34 Pemerintah Provinsi	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
					3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan
	d	Penyusunan RPHJP dan RPHJpd (Penyusunan rencana pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam dokumen RPHJP dan RPHJpd yang sudah disahkan)	Jumlah Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen
					3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit
					3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen
	e	Patroli pengamanan hutan dari gangguan hutan dan kebakaran hutan	Laporan pengamanan hutan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
					3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
	f	Penyusunan data potensi SDH	Data potensi SDH	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen
					3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi secara berkala	Dokumen
	g	Penataan batas blok dan petak (penataan batas dan tanda-tanda batas yang terpasang di lapangan)	Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit
	h	Monev Pemanfaatan Hutan	Laporan dan rekomendasi tindak lanjut	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen
					3	28	03	1.04	0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHLP	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHLP	Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHLP	Laporan
					3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen
	i	Monev Penggunaan kawasan hutan	Laporan dan rekomendasi tindak lanjut	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.08	0003	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan KHDTK	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan KHDTK	Jumlah Laporan kegiatan pengawasan KHDTK	Dokumen
					3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen
					3	28	03	1.04	0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHLP	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHLP	Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan Hutan di wilayah KPHLP	Laporan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
					6								
1	2	3	4	5							7	8	9
					3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen
		j. Penyusunan rencana detil pemanfaatan hutan seperti Rencana Bisnis atau Desain Tapak	Rencana bisnis, Desain Tapak	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen
		k. Pengadaan Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan	Sarpras perkantoran dan sarpras teknis lapangan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		l. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang PBPH, pemegang persetujuan penggunaan dan pemegang persetujuan pelepasan Kawasan Hutan, serta pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen
		m. Pembangunan kantor KPH dan/ atau resort	Jumlah kantor KPH dan/atau resort	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit
					3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resort	Tersedianya Kantor resort KPH dan Sarana Prasarana Operasionalisasi resort	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resort yang terbangun	Unit
		n. Fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Orang
		o. Fasilitasi pendampingan, pembinaan kelompok tani Hutan, dan bimbingan teknis dalam mendukung kegiatan pengelolaan perhutanan sosial	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Orang
		p. Fasilitasi penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan dan penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen
					3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen
		q. Fasilitasi pertumbuhan investasi, pengembangan industri, promosi produk hasil hutan dan pasar, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang
					3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Orang
					3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
		r. Fasilitasi ketahanan pangan (<i>food estate</i>) dan energi yang dilaksanakan KPH	Laporan Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
6	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Kampanye/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pameran)	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		b. Pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga	Unit/Buku/lembar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
1	2	3	4	5	6						7	8	9
		c. Pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya	Unit/Lembar/lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		d. Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu	Unit/Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		e. Pendampingan (Pembentukan/ Pembinaan) Masyarakat Peduli Api	Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		f. Praktek Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Lokasi/Kelompok	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		g. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakar	Km	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		h. Pengelolaan Bahan Bakar dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan											
		1) Pembuatan kompos hasil limbah vegetasi	Kg/Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		2) Pembuatan cuka kayu hasil limbah vegetasi	Kg/Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		3) Pembuatan asap cair hasil limbah vegetasi	Kg/Kelompok Masyarakat	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		4) Peningkatan usaha kerajinan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		5) Usaha produksi lainnya dari pemanfaatan hasil limbah vegetasi	Jenis dan Jumlah Usaha	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		i. Pembuatan Sekat Kanal/Embung/Kantong Air	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		j. Peningkatan koordinasi dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		k. Pengembangan sistem peringatan dan deteksi dini dalkarhuta	Unit/Sistem	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		l. Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Desa	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		m. Peningkatan kapasitas SDM Dalkarhuta (pendidikan dan pelatihan, pembekalan melalui in-house training dan on-the-job training, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya)	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
		n. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dalkarhuta	Unit										
		1) Kendaraan Bermotor khusus dalkarhuta	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
					X	XX	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
		2) Kendaraan/transortasi air	Unit	1. Pemerintah	X	XX	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
					6								
1	2	3	4	5							7	8	9
		7) Kendaraan transportasi		2. Masyarakat	X	XX	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
		3) Pompa Jingga	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
		4) Pompa Induk	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
		5) Pompa Apung	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
		6) Selang	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
		7) Nozzle	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
		8) Peralatan tangan	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
		9) Pompa Pungung	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
		10) Peralatan Pribadi (APD)	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
		11) Perlengkapan Regu	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
					X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
		o. Penetapan dan Operasional Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Posko	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
					1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
		p. Pelaksanaan Pemadaman Darat	Hari Operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan dalam satu tahun	Laporan
					1	05	03	1.03	0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
1	2	3	4	5	6						7	8	9
		1) Operasi Pengamanan di Kawasan Hutan Lindung dan Produksi	Jumlah operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
		2) Operasi Peredaran Hasil Hutan Lindung dan Produksi illegal.	Jumlah operasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan illegal (legal logging dan TSL)	Operasi
		3) Penanganan pasca Operasi Pengamanan Hutan dan Lahan	Jumlah Kasus	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Operasi
		h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan : Rakor Pengamanan Hutan tingkat Provinsi	Kegiatan	Pemerintah	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
		i. Penyegaran/Pembinaan Polisi Kehutanan	Orang	Polisi Kehutanan	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang
		j. Penyegaran/Pembinaan PPNS	Orang	PPNS	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	Orang
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang
		k. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan : Apel Siaga Pengamanan Hutan	Kegiatan	Pemerintah	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
		l. Sarana Prasarana Polisi Kehutanan (Baju Seragam Polhut dan Mobil Patroli)	Polisi Kehutanan	Polisi Kehutanan	X	XX	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
					X	XX	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
		m. Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Tahura)											
		1) Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa
		2) Patroli Pengamanan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	Ha
		3) Penyediaan Sapras Perlindungan dan Pengamanan Hutan	unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	Ha
		n. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya											
		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, meliputi :											
		1) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Dokumen/Lokus Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0001	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Dokumen
		2) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0002	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	Ha
		3) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Dokumen/Lokus kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan	
					6									
1	2	3	4	5							7	8	9	
		4) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	04	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Ha	
8	perbenihan tanaman hutan	a. Pengelolaan sumber benih (Tegakan Benih Teridentifikasi, Tegakan Benih Terseleksi, Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas)												
		1) Pembuatan batas areal sumber benih;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	Ha	
					3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih	Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	
		2) Evaluasi tegakan (pengamatan, pengukuran dan analisis data dan seleksi);	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	Ha	
		3) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging));	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	Ha	
		4) Pemangkasan (pemangkasan cabang, pemangkasan tajuk dan pemangkasan pucuk (top pruning));	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	Ha	
		5) Pemeliharaan (pembersihan tumbuhan bawah, pemberian mulsa, pemupukan);	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	Ha	
		6) Perlindungan dan Pengamanan (pengendalian hama dan penyakit; pengamanan dari pencurian kayu, pengembalaan, gangguan pada pohon-pohon, pengambilan kayu bakar, gangguan terhadap identitas famili dan papan nama; pencegahan dan pengendalian kebakaran); dan/atau	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	Ha	
		7) Pemanfaatan/pengunduhan benih.	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	Ha	
		b. Pembangunan sumber benih Areal Produksi Benih, Tegakan Benih Provenan, Kebun Benih Semai, Kebun Benih Klon, Kebun Pangkas), melalui:	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat										
		1) Pemilihan jenis tanaman berdasarkan jenis prioritas;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih	Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	
		2) Pengumpulan benih dari individu/ family plus;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih	Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	
		3) Pembuatan rancangan penanaman;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	Ha	
		4) Pembibitan;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih	Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	
		5) Pempaman	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih	Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	
		6) Penanaman dan pemeliharaan;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih	Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	
		7) Evaluasi tegakan;	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih	Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	
		8) Penjarangan selektif (seleksi fenotipa/seleksi massa dan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan (rouging)) ; dan/atau	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih	Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	
		9) Penetapan sumber benih.	Hektar	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih	Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	
		c. Pembuatan/pengadaan bibit:												
1) Pembuatan persemaian;	Unit atau Batang	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Batang			
			3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Batang			
2) Pengadaan bibit (tender);	Unit atau Batang	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Terlaksananya pelayanan perijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	Unit Usaha			
3) Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR); dan/atau	Unit atau Batang	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Batang			
			3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Batang			

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
1	2	3	4	5	6						7	8	9
		4) Pembangunan Kebun Bibit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit atau Batang	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Kelompok Masyarakat	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit
					3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Tersedianya Kantor resor KPH dan Sarana Prasarana Operasionalisasi resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit
					3	28	03	1.01	0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Telaksananya kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH	Dokumen
		d. Penyelenggaraan sertifikasi perbenihan, meliputi:											
		1) Sertifikasi sumber benih;	Kali	1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH	3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat
		2) Sertifikasi mutu benih; dan/atau	Kali	1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH	3	28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat
		3) Sertifikasi mutu bibit.	Kali	1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH	3	28	03	1.09	0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat
		e. Pembinaan perbenihan tanaman hutan, dapat berupa:											
		1) Bimbingan teknis;	Kali atau Orang	1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH	3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan
		2) Pemantauan dan evaluasi;	Kali atau Orang	1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH	3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan
		3) Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko; dan/atau	Kali atau Orang	1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH	3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan
		4) Peningkatan kualitas SDM bidang perbenihan tanaman hutan, melalui:											
		a) Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih;	Kali atau Orang	1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang
		b) Pelatihan Penilaian Sumber Benih;	Kali atau Orang	1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	Orang
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang
		c) Pelatihan Pengujian Mutu Benih ;	Kali atau Orang	1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	Orang
		d) Pelatihan Penilaian Mutu Bibit;	Kali atau Orang	1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	Orang
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang
		e) Pelatihan Pengawas Benih dan Bibit	Kali atau Orang	1. Pemerintah 2. Pelaku Usaha PTH	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	Orang

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan	
1	2	3	4	5	6						7	8	9	
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	
9	Penyuluhan kehutanan	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Orang	1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3. Penyuluh Kehutanan Swasta 4. KTH 5. Staff Dinas /CDK/KPH 6. Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	
					3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	Orang	
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	
					3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	
			b. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Masyarakat	Jumlah Lembaga	1. KTH 2. Poslulhudes 3. Masyarakat	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
			c. Pendampingan kegiatan RHL dalam kegiatan:											
			1) Sosialisasi kebijakan RHL oleh Penyuluh Kehutanan;	Orang	1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3.KTH 4.Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
			2) Identifikasi areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan;	Orang	1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3.KTH 4.Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
			3) Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar RHL; dan/atau	Orang	1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3.KTH 4.Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
			4) Bimbingan teknis RHL bagi Penyuluh Kehutanan.	Orang	1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3.KTH 4.Masyarakat	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
			5) Pengembangan Kewirausahaan Penyuluh	Orang	1. Penyuluh Kehutanan PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3.KTH 4.Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
		3				28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	
		3				28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	Orang	
			d. Pendampingan kelompok tani hutan (KTH) dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan dan monitoring RHL	Kelompok	KTH	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
	e. Peningkatan kapasitas usaha KTH dan Pembangunan Sentra Pemasaran Produk-produk Hasil KTH	Kelompok	KTH	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		
			1. Penyuluh Kehutanan	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok		

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan	
1	2	3	4	5	6						7	8	9	
		f. Fasilitas Pemberdayaan KTH melalui peningkatan kelembagaan, kelola Kawasan dan kelola usaha	Unit	PNS 2. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 3. Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	
		g. Metode dan materi penyuluhan dapat berbentuk:												
		1) Metode penyuluhan:			3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	
		1) Lomba wana lestari	Jumlah Lokasi	1. KTH 2. Masyarakat 3. Penyuluh kehutanan	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	
		2) Temu teknis KTH	Jumlah Lokasi	1. KTH 2. Masyarakat 3. Penyuluh kehutanan	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	
		3) Temu usaha KTH	Jumlah Lokasi	1. KTH 2. Masyarakat 3. Penyuluh kehutanan 4. Pelaku usaha (<i>Offtaker</i>)	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	
		4) Sekolah lapang Tematik Unggulan (RHL/ HHBK/ Perhutanan Sosial/ pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan)	Jumlah Lokasi	1. KTH 2. Masyarakat 3. Penyuluh kehutanan	3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	Orang	
		5) Workshop, dll.	Jumlah Lokasi	1. KTH 2. Masyarakat 3. Penyuluh kehutanan	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	
		6) Media cetak (buku, majalah, leaflet, booklet, bulletin, modul, dll); dan/atau	Paket	1. KTH 2. Masyarakat 3. Penyuluh kehutanan	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	
		7) Media elektronik (radio, TV dan online sistem)	Paket	1. KTH 2. Masyarakat 3. Penyuluh kehutanan	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	
		h. Penyusunan Programa (tingkat UPTD dan Provinsi) meliputi:												
		1) Identifikasi potensi wilayah menggunakan metode dan instrument <i>Participatory Rural Appraisal (PRA)</i> , <i>Impact Point</i> , <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya, dan/atau	Dokumen	1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	
								3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat
		2) Program penyuluhan kehutanan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) kehutanan.	Dokumen	1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	
								3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	
		i. Monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	Laporan	1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	
								3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang	
		j. Pembangunan unit percontohan penyuluhan kehutanan/demplo	Unit	1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	
								3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Kinerja	Indikator	Satuan	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	
					3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang kehutanan yang meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang
		k. Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang terdiri atas:											
		1) Sarana perlengkapan perorangan;	Unit	1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		2) Sarana dan prasarana pendukung utama; dan/atau	Unit	1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		3) Sarana pendukung lainnya.	Unit	1. Pemerintah 2. Penyuluh Kehutanan 3. Masyarakat	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
10	Program strategis lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah	a. Penguatan Perekonomian Daerah yang meliputi :											
		1) Penyusunan dokumen <i>Integrated Area Development</i> oleh bupati/walikota	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat									
		2) Penyediaan sarana dan prasarana	Unit	1. Pemerintah 2. Masyarakat	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		3) Pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;	UMKM	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha
		4) Dukungan standarisasi, sertifikasi, dan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah yang terkait produk dari perhutanan sosial;	UMKM	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
					2	17	07	1.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha
		5) pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan;	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen
					3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
		6) Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan;	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang
					2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang
		7) Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mendorong upaya pelestarian hutan;	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha
					3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
		9) Pengembangan destinasi pariwisata sektor kehutanan.	Lokasi	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	26	02	1.01	0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	Dokumen
		9) Penelitian dan pengembangan	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen
					5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen
		h. Pemberian insentif atas kinerja pengelolaan	Kabupaten/Kota	1. Pemerintah	4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Output	Penerima Manfaat	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025						Kinerja	Indikator	Satuan
					6								
1	2	3	4	5	6						7	8	9
		b. lingkungan hidup dan kehutanan	Kabupaten/Kota	2. Masyarakat	5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan
		c. Dukungan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan yang dibagihasikan	Kegiatan/Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat"	3	28	03	1.03	0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P	Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P	Laporan
					5	02	02	1.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen
		d. Dukungan Kesekretariatan penyusunan, pembinaan, dan/atau pengawasan DBH DR Provinsi	Kegiatan/Laporan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
		e. Bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota	Kabupaten/Kota	1. Pemerintah 2. Masyarakat	5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan
		f. Pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja dan/atau kelompok sektor kehutanan dalam rangka jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Orang	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang
		g. Pengelolaan kebersihan dalam rangka pelestarian hutan dalam dan luar kawasan	Kegiatan	1. Pemerintah 2. Masyarakat	2	11	11	1.01	0011	Pengelolaan sampah Regional	Terlaksananya Pengelolaan sampah regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	Ton
					2	11	11	1.01	0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Unit
		h. Pengelolaan jalan sekitar kawasan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan sesuai dengan kewenangannya	Km	1. Pemerintah 2. Masyarakat	1	03	10	1.01	0058	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	KM
					1	03	10	1.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM
		i. Dukungan dalam rangka pencapaian <i>Folu net sink</i> 2030 meliputi :											
		1) Penyusunan Rencana Kerja <i>folu Net Sink</i> 2030	Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	5	01	03	1.02	0006	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
		2) monitoring dan evaluasi <i>folu Net Sink</i> 2030	Kegiatan/Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
		3) Pengendalian dan pengawasan <i>folu Net Sink</i> 2030	Kegiatan/Dokumen	1. Pemerintah 2. Masyarakat	5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan